

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jalan Yos Soedarso No. 02 Palangka Raya (73112)
Telp. (0536) 3221703 Fax (0536)3222652

KATA PENGANTAR

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan salah satu bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang diwujudkan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Sebagai penjabaran tujuan tersebut dan untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis tersebut disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pikiran dan tenaga. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Januari 2017

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Drs. HARDY RAMPAY, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19571227 198003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	31
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra KL	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	38
BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	40
4.1. Visi dan Misi	40
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
4.3. Strategi dan Kebijakan	42

BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
	5.1. Program Prioritas.....	45
	5.2. Indikator Kerja	48
	5.3. Kelompok Sasaran	51
	5.4. Pendanaan Indikatif.....	52
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	53
BAB VII	PENUTUP.....	55
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 89 mengenai penyusunan Rencana Strategis SKPD yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan sebagai integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis skala lokal, nasional, dan global dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dilakukan selama ini menitikberatkan pada sistem sentralistik dan autokratik namun dengan bergulirnya otonomi daerah maka berubah menjadi sistem Desentralistik dan Demokratik di mana perencanaan saat ini dilakukan dari bawah keatas atau *bottom Up planning* bukan dari atas ke bawah. Dalam rangka memasuki Era Daerah Membangun agar tidak terulang kembali kesalahan pada masa lalu maka diperlukan adanya strategi dan kebijakan pembangunan dengan peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, relevansi dan keberlanjutan pembangunan serta pelestarian lingkungan.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan salah satu bagian yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah yang mana didalam pelaksanaannya ditemukan banyak permasalahan yang cukup kompleks seperti tingkat penganggur terbuka yang cukup tinggi, kualitas dan ketrampilan tenaga kerja belum mampu memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh pasar kerja, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja belum berjalan secara harmonis yang ditandai masih terjadinya perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, mogok kerja.

Sementara dibidang ketransmigrasian masih terlihat tidak meratanya persebaran penduduk yang berakibat kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk, ketidak seimbangan lingkungan hidup dan ekosistem alam sehingga perlu penataan persebaran penduduk melalui pengerahan mobilitas penduduk, pengembangan dan pemberdayaan kawasan.

Sejalan dengan berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil dan dilaksanakan dalam rangka perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta membangun wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat transmigrasi melalui penyusunan rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat memberi arah bagi kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dapat menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab semua permasalahan baik ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian sebagai pengganti UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memberikan arah/acuan mengenai sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan dan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

- a. Mengetahui kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di masa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
- b. Memandu perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan;
- c. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan;**** berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.
- BAB II **Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;**** berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
- BAB III **Isu-Isu Strategis;**** berisi permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- BAB IV **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan;**** berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021.
- BAB V **Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif;**** berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VI **Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD;**** berisi mengenai Indikator Kinerja, Kondisi Awal Kinerja, dan Kondisi Akhir Kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.
- BAB VII **Penutup****

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijaksanaan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan dan pelayanan umum bidang ketransmigrasian dan tenaga kerja;
3. penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
4. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan ;
6. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD;
7. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian izin dan atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan

- perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
8. pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;
 9. pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
 10. pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;
 11. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
 12. Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan dari kabupaten/kota;
 13. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan penempatan dan pada tahapan kemandirian;
 14. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
 15. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi; dan
 16. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.

2.1.1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan organisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas**
- 2) Sekretariat, membawahkan:**
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Bidang terdiri dari:**
 - a. Bidang Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk, membawahkan:
 - Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas;
 - Seksi Perpindahan, Persebaran dan Penyerasian; dan
 - Seksi Evaluasi Kelayakan Permukiman, Adaptasi dan Pelayanan Pertanahan.

- b. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, membawahkan:
 - Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Ekonomi;
 - Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan; dan
 - Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman.
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - Seksi Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial; dan
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak;
 - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional;

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah masing-masing sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi di atas, secara rinci fungsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan program-program kegiatan bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan dan pelayanan umum bidang transmigrasi dan tenaga kerja;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan kluster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD;
- h. pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah, penerbitan Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, perlindungan TKI, pengesahan RPTKA perpanjangan, penerbitan perpanjangan IMTA;
- j. pelaksanaan pengesahan peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB), Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan, dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- k. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
- l. Penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah;

- m. penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari kabupaten/kota;
- n. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan penempatan;
- o. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
- p. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
- q. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi;
- r. pelaksanaan kepesertaan BPJS dan jaminan sosial tenaga kerja;
- s. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- t. pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- u. pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- v. pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas; dan
- w. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perencanaan anggaran;
- b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3) Bidang Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk

Bidang Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan lahan, pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dan evaluasi kelayakan permukiman dan penataan persebaran penduduk, penyiapan calon transmigrasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pelayanan perpindahan, penataan dan adaptasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan Operasional Bidang Pembangunan Permukiman dan Penataan Persebaran Penduduk berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. pengoordinasian layanan pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
- c. pengoordinasian pengolahan data dan informasi pembangunan permukiman transmigrasi;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan petunjuk pembangunan permukiman transmigrasi;
- e. pengoordinasian dengan instansi terkait pembangunan permukiman transmigrasi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pembangun fisik satuan permukiman di kawasan transmigrasi;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan dan persebaran penduduk;

- h. pengoordinasian penyiapan bahan calon trans dan penduduk setempat dan pelayanan perpindahan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan pedoman pelayanan pendaftaran dan seleksi calon trans;
- j. pengoordinasian penyiapan bahan penempatan dan adaptasi;
- k. pengoordinasian dan mengevaluasi kegiatan penataan pesebaran penduduk;
- l. pengoordinasian penyusunan pedoman penjajagan kerjasama; dan
- m. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4) Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan pedoman layanan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, prasarana dan sarana, pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman dan penyelesaian pertanahan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. pengkoordinasian dan pembinaan usaha-usaha ekonomi produktif, peningkatan produktivitas lahan pertanian transmigran;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan penginventarisasian kelembagaan ekonomi dan pemasaran serta kelembagaan usaha pertanian serta promosi dan kemitraan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan sosial budaya, mental spiritual dan kelembagaan pemerintah dan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat transmigran;
- e. penginventarisasian kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

- f. pengkoordinasian dan pembinaan pengembangan prasarana dan sarana, dan pengelolaan sumberdaya alam satuan permukiman;
- g. penginventarisasian kebutuhan pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha ekonomi, pengembangan sosial budaya dan pengembangan prasarana dan sarana;
- i. penyusunan pedoman bidang pengembangan usaha ekonomi, pengembangan sosial budaya dan pengembangan prasarana dan sarana;
- j. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan usaha ekonomi, pengembangan sosial budaya dan pengembangan prasarana dan sarana;
- k. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha ekonomi, pengembangan sosial budaya dan pengembangan prasarana dan sarana;
- l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha ekonomi, pengembangan sosial budaya dan pengembangan prasarana dan sarana;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- n. pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah, pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah Provinsi, penerbitan Izin LPTKS, pengelolaan Informasi Pasar Kerja, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan TKA, lokasi kerja dan penerbitan Perpanjangan IMTA.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan Operasional Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) ;
- c. pengoordinasian pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;
- d. pengoordinasian penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- e. pelaksanaan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- f. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sertifikasi dan pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pengesahan RPTKA perpanjangan serta Penerbitan Perpanjangan IMTA;
- h. pengoordinasian penyiapan program pelatihan dan pemagangan;

- i. pengoordinasian perantara kerja dalam pelayanan antar kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- j. pengoordinasian penyiapan instruktur dan tenaga pelatih;
- k. pelaksanaan informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja, peningkatan produktivitas, informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan Informasi Pasar Kerja kepada Pencari Kerja dan pemberi kerja di dalam dan diluar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar negeri hubungan kerja);
- l. pengoordinasian pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja ;
- m. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan Jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- n. pelaksanaan verifikasi penerbitan Izin LPKTKS Kabupaten/Kota dan memverifikasi dokumen Pengesahan RPTK Perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan lokasi kerja;
- o. pengoordinasian penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan Informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan lokasi kerja;
- p. pengoordinasian penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- q. pengoordinasian penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;
- r. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

6) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penataan SP/SB, organisasi

pengusaha dan perusahaan, Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS) dan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan Operasional Bidang Hubungan Industrial berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. memverifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah provinsi;
- c. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- d. mengkoordinasikan penataan SP/SB, organisasi pengusaha dan perusahaan
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan hubungan industrial di Perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
- f. mengkoordinasikan Pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
- g. mengkoordinasikan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. mengkoordinasikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
- i. mengkoordinasikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- j. mengkoordinasikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

7) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perumusan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan meliputi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak, Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jaminan Sosial, serta Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merencanakan Operasional Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan rencana operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;
- b. mengoordinasikan penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja ;
- c. mengoordinasikan pemeriksaan kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- d. mengoordinasikan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan dan tempat kerja;
- e. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kepada perusahaan;
- f. mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada perusahaan;
- g. mengoordinasikan penyusunan sistem dan mekanisme penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada perusahaan;
- h. mengoordinasikan penyusunan administrasi penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja;
- i. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pemeriksaan kepatuhan ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- j. mengoordinasikan peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;

- k. mengoordinasikan penyusunan Sistem Informasi dan mekanisme pemeriksaan kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- l. mengoordinasikan penyusunan administrasi pemeriksaan kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- m. mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pengujian kepatuhan ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- n. mengoordinasikan peningkatan kapasitas SDM untuk melakukan pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- o. mengoordinasikan penyusunan sistem informasi dan mekanisme pengujian kapasitas norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- p. mengoordinasikan penyusunan administrasi pengujian kepatuhan norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan wajib laporan ketenagakerjaan (WLK);
- r. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan dan peraturan ketenagakerjaan;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggar norma ketenagakerjaan;
- t. mengoordinasikan penegakan hukum ketenagakerjaan dengan bidang dan/atau instansi terkait; dan
- u. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling

puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Dasar (SD)	2	0	2	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	12	1	3	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	28	19	47	
4	Sarjana Muda/D3/D2	8	6	14	
5	Sarjana (S-1)	64	30	94	
6	Sarjana (S-2)	8	1	9	
	Jumlah	112	57	169	

Dari jumlah pegawai sebanyak 160 karyawan ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Pangkat golongan yang memiliki angka minoritas adalah golongan IV/e dengan jabatan Pembina Utama sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/c Juru	2	0	2	
2	II/a Pengatur Muda	4	0	4	
3	II/b Pengatur Muda Tk. I	0	0	1	
4	II/c Pengatur	4	3	7	
5	II/d Pengatur Tk. I	2	2	4	
6	III/a Penata Muda	15	3	18	
7	III/b Penata Muda Tk.I	32	19	51	
8	III/c Penata	14	4	18	
9	III/d Penata Tk. I	21	21	42	
10	IV/a Pembina	6	3	9	
11	IV/b Pembina Tk. I	8	3	11	
12	IV/c Pembina Utama Tk. I	1	0	1	
13	IV/d Pembina Utama Madya	1	0	1	
13	IV/e Pembina Utama	1	0	1	
	Jumlah	111	58	169	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai. Data ini bisa dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	7	1	8
3	Eselon IV	15	6	21
4	Fungsional	26	15	41
5	Non Struktural / Fungsional	74	24	98
	Jumlah	123	46	169

2) Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Prasarana dan Sarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Sarana	Jumlah/Satuan	Keterangan
1	Ruang Kerja	1.060 m ²	
2	Ruang Rapat	143 m ²	
3	Aula	884 m ²	
4	Ruang Pelatihan	308 m ²	
5	Asrama	471,5 m ²	
6	Transito	864 m ²	
7	Gudang	200 m ²	
8	Mess	72 m ²	

9	Rumah Jabatan	1 Unit (120 m ²)	
10	Rumah Pegawai	64 Unit	
2	Meja Kerja	125 Buah	
3	Kursi Kerja	610 Buah	
4	Kursi Sofa	8 Buah	
5	Lemari Arsip	25 Buah	
6	Filling Kabinet	24 Buah	
7	Brankas	7 Buah	
8	AC	33 Buah	
9	Kipas Angin	40 Buah	
10	Personal Computer	43 Buah	
12	Printer	28 Buah	
13	Laptop	19 Buah	
14	Kamera Photo	3 Buah	
15	Mesin Tik	6 Buah	
17	Kendaraan Roda Dua	29 Buah	
18	Kendaraan Roda Empat	5 Buah	
19	LCD	3 Buah	
20	Handycam	1 Buah	

3) Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/profram yang tercapai. Berikut ini Target Pendapatan dan anggaran Pagu tahun 2014-2015 untuk dijadikan

a. Target Pendapatan

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	30.000.000	30.500.000	101,67%
2012	35.000.000	37.190.000	106,26%
2013	46.000.000	46.100.000	100,22%
2014	52.900.000	53.000.000	101,93%
2015	80.835.000	184.699.000	228.49%
Total	244.735.000	351.489.000	143,62%

Apabila dibandingkan antara tahun 2014 dengan 2015, terdapat kenaikan sebanyak Rp 87.935.000,00 atau meningkat 166.23 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perpanjangan IMTA, sehingga sejak tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhak memungut Restribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

b. Pelaksanaan APBD

Perkembangan pagu anggaran dari tahun 2011-2015 tidak mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2011 pagu anggaran sebesar Rp. 10.224.100.000,- dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- Sedangkan untuk realisasi keuangan setiap tahunnya rata-rata di atas 90 persen. Untuk rincian pagu dan realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 – 2015

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	10.224.100.000	9.530.665.187	93,22
2012	9.999.750.000	9.563.230.493	95,63
2013	11.560.000.000	11.079.507.407	95,84
2014	13.917.000.000	13.591.615.098	97,66
2015	15.000.000.000	14.565.379.727	97,10
Total	60.700.850.000	58.330.397.912	96,09

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan dalam 4 (empat) sasaran strategis yaitu: (1) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif; (2) Terciptanya kesempatan kerja yang efektif dan lapangan kerja baru; (3) Terjalannya hubungan industrial yang harmonis dan terciptanya pengawasan ketenagakerjaan yang profesional; dan (4) Terciptanya kemandirian transmigran.

Untuk sasaran strategis “Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif”. salah satu indikator untuk mencapai sasaran ini adalah hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). dimana pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini dilakukan terus menerus setiap tahunnya oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.



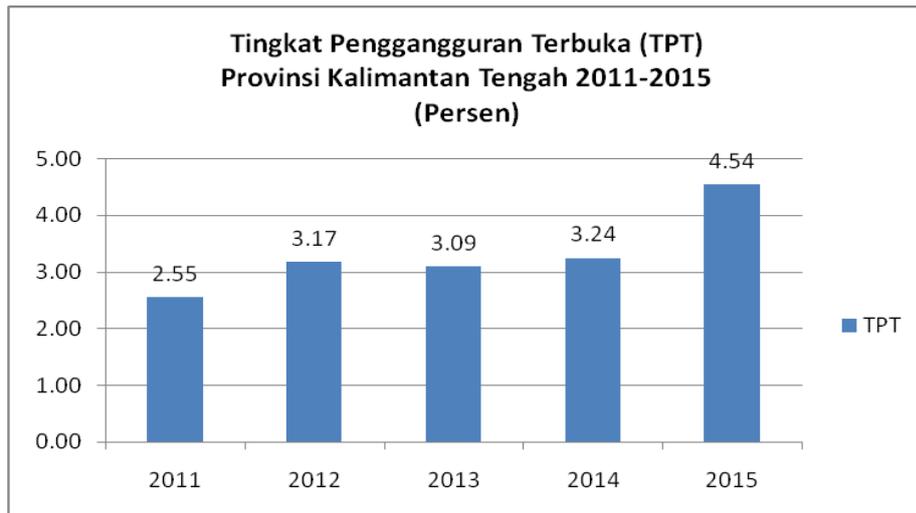
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Menerima
Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2013

Nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. terhadap kebijakan dan program ketenagakerjaan yang telah diterapkan. Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini dilakukan sejak tahun 2011. dan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang menggembirakan.

Tabel 2.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2015

KALIMANTAN TENGAH	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
PERINGKAT	12	4	3	3	7
NILAI IPK	53,27	58,72	62,02	63,59	60,90

Untuk sasaran strategis “Terciptanya kesempatan kerja yang efektif dan lapangan kerja baru”. indikator pencapaian sasaran ini adalah rasio jumlah Penganggur Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ini merupakan indikator sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan.



Target Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini masih belum sepenuhnya mencapai target yang diamanahkan dalam RPJMD (TPT Tahun 2015 ditargetkan turun menjadi 2.00 persen)

Walaupun target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Tengah ini masih belum mencapai target. tetapi bila dilihat secara nasional. TPT Kalimantan Tengah menunjukkan kondisi yang baik. karena bila dilihat secara nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada tahun 2015 sebesar 6.18 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Pulau Kalimantan. TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 merupakan yang terendah sebesar 3.24 persen. sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 7.38 persen.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Kalimantan
Tahun 2012-2015
(Persen)

Provinsi	Tahun (Bulan Agustus)			
	2012	2013	2014	2015
Kalimantan Barat	3.48	4.03	4.04	5.15
Kalimantan Tengah	3.17	3.09	3.24	4.54
Kalimantan Selatan	5.25	3.79	3.80	4.92
Kalimantan Timur	8.90	7.08	7.38	7.50
Indonesia	6.14	6.25	5.94	5.68

Berita Resmi Statistik No. 08/11/62/Th.IX. 5 November 2015

Indikator lain dari sasaran strategis “Terciptanya kesempatan kerja yang efektif dan lapangan kerja baru” ini adalah **Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan**. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu masalah utama ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Untuk mengurangi jumlah pengangguran ini, dilakukan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja.

Tabel 2.9
Pencari Kerja yang Ditempatkan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

KALIMANTAN TENGAH	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pencari Kerja yang Ditempatkan	2.164	1.400	1.977	1.738	2.063

Dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah telah menempatkan 9.342 orang pencari Kerja. Bila dibandingkan dengan target RPJMD, pencapaian ini sangat jauh dari target, dimana dalam RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 Penempatan Tenaga Kerja ditargetkan 5.000 orang per tahun.

Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi capaian tersebut yaitu karena kurangnya informasi/laporan dari pihak pengguna sehingga penempatan tenaga kerja tidak semua terdata di dinas yang menangani ketenagakerjaan kabupaten/kota. Untuk masa mendatang, hal tersebut akan lebih digalakkan melalui pengembalian Kartu AK1 dari penerima tenaga kerja kepada dinas yang mengeluarkan AK1, sehingga setiap penempatan tenaga kerja dapat terdata. Hal lain yang menjadi isu strategis yang mempengaruhi rendahnya penempatan tenaga kerja adalah masih terbatasnya lowongan kerja dan kurang lancarnya informasi tentang pasar kerja. Untuk itu di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja melalui pembentukan/pengembangan usaha mandiri dan usaha produktif serta meningkatkan pendataan lowongan dan mengefektifkan Bursa Kerja Online (BKOL)

Untuk Sasaran Strategis **"Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan pengawasan ketenagakerjaan yang profesional"**, pencapaiannya bisa dilihat dari penerapan Upah Minimum Provinsi, dimana Upah Minimum adalah suatu jaring pengaman yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa Pemerintah menetapkan upah

minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun Perkembangan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Tengah selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015

1. *Upah Minimum Provinsi (UMP)*

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		/Bulan (Rp.)					
1.	Kalimantan Tengah	986.590	1.134.580	1.327.459	1.553.127	1.723.970	1.896.367

2. *Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)*

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		/Bulan (Rp.)					
1.	Sektor Pertanian. Peternakan. Kehutanan. Perburuhan. dan Perikanan						
	- (12) Perkebunan dan hutan Tanaman Industri (HTI)	1.035.920	1.191.310	1.393.832	1.630.783	1.810.169	1.991.185
	- (15200) Penebangan Kayu (<i>Logging</i>)	1.035.920	1.191.310	1.393.832	1.630.783	1.810.169	1.991.185
2.	Sektor Industri Pengolahan	1.035.920	1.191.310	1.393.832	1.630.783	1.810.169	1.991.185
3.	Sektor Bangunan	1.085.250	1.214.000	1.420.381	1.661.846	1.861.888	2.029.113
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	1.085.250	1.214.000	1.420.381	1.661.846	1.861.888	2.048.076
5.	Sektor Jasa	1.035.920	1.191.310	1.393.832	1.630.783	1.810.169	1.953.258
6.	Sektor Listrik. Gas dan Air	1.035.920	1.191.310	1.343.832	1.630.783	1.844.648	1.991.185

Selama Tahun 2011-2015. setelah Peraturan Gubernur tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tersebut ditetapkan, selanjutnya dalam penangguhan upah, tidak satu pun perusahaan yang melakukan penangguhan upah sebagaimana peraturan yang berlaku.

Indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis **"Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan pengawasan ketenagakerjaan yang profesional"**, hal ini terlihat dari banyaknya kasus perselisihan Hubungan Industrial yang bisa diselesaikan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Tabel 2.11

Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan di Tingkat Bipartit
 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

KALIMANTAN TENGAH	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	2	20	42	23	164

Sasaran Strategis **"Terciptanya kemandirian transmigran"** menjadi tupoksi yang melekat pada bidang yang menangani Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran ini dicapai melalui penempatan dan pembinaan transmigran. Dimana program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini sangat berperan dalam pembangunan daerah sehingga semula Provinsi Kalimantan Tengah hanya 5 kabupaten dan 1 kota sekarang menjadi 13 kabupaten dan 1 kota. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan transmigrasi yang pada hakekatnya sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Tabel 2.12
Jumlah Penempatan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

KALIMANTAN TENGAH	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Transmigran (KK)	860	1.155	545	0	0

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. pada tahun menargetkan penempatan sebanyak 7.400 KK transmigran. Namun. sampai dengan Tahun 2015. baru 2.560 KK yang ditempatkan. Tidak tercapainya target ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memutuskan untuk melakukan moratorium (penundaan sementara) program Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) berikut penempatannya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah pada Tahun 2014. Moratorium ini juga didasarkan atas masalah yang berkembang di tengah masyarakat. antara lain:

- Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta
- Lahan yang telah dibagikan kepada transmigran bahkan ada yang sudah bersertifikat tetapi diklaim penduduk setempat. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi karena ketentuan membuka lokasi transmigrasi lokasi tersebut hasil *clear and clean* dengan bukti pernyataan penyerahan lahan dari penduduk setempat. Dan kepada penduduk yang lahannya terkena diprioritaskan menjadi warga transmigran. Namun pada kenyataannya setelah dibuka dan mereka menjadi warga transmigran masih mengklaim kepemilikan tersebut.
- Dengan perubahan kebijakan pemerintah terdapat lokasi yang sudah lebih sepuluh tahun yang lalu dibuka lahan mereka menjadi hutan lindung/hutan produksi.

Kebijakan Moratorium ini dimaksudkan untuk menata kembali transmigran yang sudah ada. Salah satu bentuk penataan itu adalah pembinaan masyarakat transmigrasi yang masih dalam masa pembinaan. Adapun rincian lokasi Transmigrasi yang masih menjadi Beban Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Lokasi Permukiman/Kawasan Transmigrasi Bina
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

No	KABUPATEN	KK	JIWA
1	Kab. Kapuas (Dadahup C3. C4 dan B4)	510	1.837
2	Kab. Barito Utara (Sei Rahayu)	80	309
3	Kab. Kobar (Kumai Seberang)	275	748
4	Kab. Katingan (Hyang Bana)	500	1.882
5	Kab. Sukamara (Pulau Nibung)	55	185
6	Kab. Lamandau (Bayat)	220	835
7	Kab. Gunung Mas (Tumbang Jutuh)	300	1.087
8	Kab. Murung Raya (Bahitom)	300	1.289
9	Kab. Barito Timur (Telang Siong)	300	1.102
10	Kab. Kotawaringin Timur (Kandan)	350	1.421
11	Kab. Seruyan (Tanggul Harapan)	350	1.336
12	Kab. Pulang Pisau (Anjir Pulpis)	70	332
Jumlah Total		3.310	12.353

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Meningkatkan pelayanan merupakan suatu tantangan untuk menjadi lebih baik kondisi umum dilihat dari analisis **SWOT** (*Strenght-Weakness-Oportunity-Treat*) terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. **Kekuatan** yang dimiliki:

- Komitmen dan motivasi kerja pegawai cukup kuat.
- Ketersediaan anggaran dan fasilitas penunjang tupoksi yang cukup memadai.
- Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah cukup memadai.
- Tersedianya potensi kawasan transmigrasi
- Hasil pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama ini
- Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

2. **Peluang** yang dimiliki:

- Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- Keadaan geografis Kalimantan Tengah yang luas
- Adanya kebijakan penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan *Standard Operational Procedure*
- Penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan
- Pengembangan pusat ekonomi baru pada daerah kawasan pembangunan transmigrasi

3. **Kelemahan** yang dimiliki:

- Meningkatnya Angka Pengangguran
- Belum lengkap dan akuratnya basis data tentang kondisi dan potensi pembangunan transmigrasi di Kalimantan Tengah.
- Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal.
- Permasalahan lahan transmigrasi tumpang tindih
- Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan stakeholder belum berjalan baik
- Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian belum didukung dengan perencanaan yang akurat

4. **Ancaman** yang dimiliki:

- Implementasi Tata Ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan.
- Adanya UPT-UPT bermasalah dan anggapan sebagian orang bahwa transmigrasi adalah memindahkan kemiskinan
- Kondisi infrastruktur yang kurang menunjang.
- Moratorium Transmigrasi
- Aksesibilitas kawasan transmigrasi masih terbatas
- Munculnya berbagai tuntutan, antara lain: ganti rugi lahan, sengketa lahan baik dengan penduduk sekitar maupun dengan perusahaan perkebunan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi masa depan untuk peningkatan mutu dan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Peningkatan komitmen dan motivasi kerja untuk mendukung kebijakan Pusat dan Daerah bidang ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
2. Pemberdayaan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya lahan untuk kawasan transmigrasi secara optimal.
3. Peningkatan koordinasi satuan kerja baik internal maupun eksternal.
4. Fokus pada pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian yang terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah.
5. Penyusunan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
6. Koodinasi internal maupun eksternal secara intensif.
7. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Disnakertrans cukup memadai dan potensi sumber daya lahan cukup luas. didukung partisipasi tenaga kerja dan transmigran yang positif membuat kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dalam mengelola potensi sumberdaya manusia dan transmigran secara optimal.

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kondisi ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka setiap tahunnya disebabkan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal, disamping itu pembukaan lapangan kerja baru di sektor swasta belum mampu menyerap tenaga kerja lokal, rendahnya kualitas SDM Pencari kerja sehingga belum mampu terserap di pasar kerja lokal maupun nasional. Pada tahun 2015, jumlah pengangguran terbuka sebanyak 57.780 orang dan angkatan kerja sebanyak sedangkan data pencari kerja yang terdaftar sebanyak 16.390 orang (Data Dinas Nakertrans sampai dengan April 2015). Penyebab banyaknya penganggur ini adalah karena adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun.

Disamping masalah pengangguran, masalah lain yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 26 orang dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diawasi sebanyak 1.949 perusahaan. Juga terjadi hubungan industrial yang kurang harmonis antara pekerja dan pengusaha sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya PHK.

Sedangkan di bidang Ketransmigrasian, permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya Kebijakan moratorium (penundaan sementara) program Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) berikut penempatannya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Moratorium yang diberlakukan sejak tahun 2014 ini didasarkan atas masalah yang berkembang di tengah masyarakat, antara lain:

- Kepemilikan lahan yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta
- Lahan yang telah dibagikan kepada transmigran bahkan ada yang sudah bersertifikat tetapi diklaim penduduk setempat. Hal ini seharusnya tidak akan terjadi karena ketentuan membuka lokasi transmigrasi lokasi tersebut hasil *clear and clean* dengan bukti pernyataan penyerahan lahan dari penduduk setempat, dan kepada penduduk yang lahannya terkena diprioritaskan menjadi warga transmigran. Namun pada kenyataannya setelah dibuka dan mereka menjadi warga transmigran masih mengklaim kepemilikan lahan tersebut.
- Dengan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut RTRWP terdapat lokasi yang sudah lebih sepuluh tahun yang lalu dibuka menjadi lahan mereka, statusnya menjadi hutan lindung/hutan produksi.

Selain itu permasalahan yang sering dihadapi adalah lahan usaha yang kurang subur (marginal) karena rendahnya pH tanah, tidak tersedianya pasar untuk pemasaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi, disamping permasalahan utama diatas, permasalahan lain yang dihadapi minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi, kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

***“Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat
menuju Kalteng BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) Misi sebagai berikut:

- Misi Pertama : **Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi**
- Misi Kedua : **Percepatan Pembangunan Infrastruktur**
- Misi Ketiga : **Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai**
- Misi Keempat : **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**
- Misi Kelima : **Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi**
- Misi Keenam : **Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata**
- Misi Ketujuh : **Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam**
- Misi Kedelapan : **Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Dari Visi dan Misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi sekurang-kurangnya berhubungan dengan visi **“Kalteng Maju dan Mandiri”** dan Misi ke-4 yaitu **“Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan”**, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan tugas mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun nasional serta pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM transmigran yang produktif dan mandiri sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarganya menuju kesejahteraan.

3.3. Telaahan Renstra KL

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan nasional. Pembangunan Ketenagakerjaan dalam ini kerangka Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019 masuk ke dalam agenda pertama dan keenam dari NAWACITA, yaitu:

- a. Agenda prioritas “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memmberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;” dan
- b. Agenda prioritas “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.”

Sedangkan Sasaran Utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai adalah:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar antara 4,0 – 5,0 % pada tahun 2019
- b. Memfasilitasi penciptaan kesempatan kerja sebesar 10% selama 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dirumuskan 9 agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan **NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN**, yaitu:

- a. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
- b. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
- c. Percepatan Sertifikasi Profesi;
- d. Perluasan Kesempatan Kerja Formal;
- e. Penguatan Wirausaha Produktif;
- f. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif;
- g. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
- h. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
- i. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

“**Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional**” merupakan prioritas pertama yang sedang dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Tenaga Kerja (PTK). Hal ini dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan nasional. Menyusun PTK ini merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota), sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan, dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Dengan menyusun PTK berarti adanya acuan untuk penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusunan PTK ini juga merupakan dasar pelaksanaan program pemerintah dalam hal *Pro-Growth, Pro job, Pro-Poor dan Pro Environment*, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah *pro job*. Secara lebih teknis, dengan PTK tersebut, diharapkan dapat mengantisipasi munculnya permasalahan ketenagakerjaan seperti: besarnya jumlah penganggur terbuka, terbatasnya penyediaan lapangan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, produktivitas yang kurang maksimal, adanya pemogokan dan PHK serta kesejahteraan pekerja yang relatif masih rendah.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah ***“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”***, sebagaimana disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3. Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selami ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK mencanangkan pembangunan Indonesia dengan memperkuat dan memberdayakan desa. Pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (*linkage*), keselarasan (*harmony*) dan kemitraan (*partnership*). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah perdesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil,

dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/jasa, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern.

Sedangkan Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intrakawasan dan antarkawasan serta keterkaitan desa-kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agrobisnis untuk mewujudkan satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah:

a. Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Penyiapan Kawasan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mencakup:

- 1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pembinaan potensi kawasan, kerjasama antar daerah dan perencanaan sarana dan prasarana, penataan dan persebaran penduduk, serta perencanaan pengembangan masyarakatnya
- 2) Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan tempat tinggal dan lahan usaha;
- 3) Pemenuhan prasarana dan sarana dasar di permukiman transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi: Pembangunan prasarana dan sarana dasar, lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal, strtageis dan cepat tumbuh dan perbatasan: jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa, perumahan, dan sarana pelayanan umum;

b. Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada daerah tertinggal, dan perbatasan dan serta strategis cepat tumbuh, mencakup :

- 1) Pengembangan Promosi dan Kemitraan meliputi Publikasi dan Promosi, Kerjasama Badan Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah.
- 2) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana kawasan transmigrasi, meliputi: Pengembangan Sarana dan Prasarana di Satuan Permukiman (SP), Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di KPB, SKP, Kawasan Transmigrasi; dan Penyerasian Lingkungan.
- 3) Pengembangan usaha ekonomi transmigrasi, meliputi: peningkatan produksi pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan, serta pengembangan kewirausahaan di kawasan Transmigrasi.
- 4) Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi meliputi: Pangan, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Kelembagaan di kawasan Transmigrasi.
- 5) Pelayanan Pertanahan Transmigrasi meliputi Sertifikasi kepemilikan lahan dan penanganan masalah pertanahan.

c. Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Masyarakat Desa.

Strategi yang dilaksanakan di desa, daerah tertinggal, perbatasan, daerah strategis dan cepat tumbuh maupun kawasan transmigrasi tahun 2015-2019 dalam hal penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan masyarakat desa adalah:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan data dan informasi;
- 2) Evaluasi pembangunan dan pengembangan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- 3) Penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 4) Pelatihan masyarakat desa, dan masyarakat transmigrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam rangka transformasi struktur perekonomian daerah harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah tersebut, pengembangan transmigrasi di Kalimantan Tengah dihadapkan pada keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK). Disamping itu permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan perusahaan perkebunan. Sedangkan di sisi lain, animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi sangat tinggi.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil telaah permasalahan pada lingkup tugas dan pelayanan Dinas, telaah visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, telaah renstra kementerian dan lembaga, serta telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu-isu strategis yang akan direspon oleh Dinas dalam perencanaan di 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pengangguran cukup tinggi.

Pada tahun 2015 jumlah pengangguran sebanyak 57.780 orang, sedangkan angkatan kerja berjumlah 1.272.461. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka-nya sebesar 4,54%.

b. Masih rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

Pada tahun 2015, nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat 7 nasional dengan nilai Indeks 60.90 (Pencapaian IPK ini

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dimana Kalimantan Tengah menempati peringkat III dengan nilai Indeks 63.60) .

- c. Masih rendahnya kompetensi lulusan BLK sehingga tidak mampu bersaing di pasar kerja serta dalam mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.**

Pada tahun 2015 kapasitas BLK tersedia 1.728 orang

- d. Rendahnya penempatan tenaga kerja**

Pada tahun 2015, dari 9.309 tenaga kerja yang terdaftar, hanya 2.063 orang yang ditempatkan (atau persentase penempatan tenaga kerja hanya 22,16%)

- e. Masih belum optimalnya kualitas Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

Pada tahun 2015, jumlah perselisihan HI adalah sebanyak 172 Kasus sedangkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 226.394 pekerja

- f. Masih belum optimalnya Kesehatan kerja dan keselamatan kerja.**

Pada tahun 2015, jumlah kasus kecelakaan kerja 12 kasus.

- g. Adanya moratorium transmigrasi**

Diakibatkan karena banyaknya kepemilikan lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan lahan perkebunan swasta, atau diklaim penduduk setempat, maupun menjadi hutan lindung/hutan produksi karena kebijakan pemerintah.

- h. Rendahnya kemandirian masyarakat transmigran.**

Diindikasi oleh masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat transmigran.

- i. Kurangnya jumlah pegawai Fungsional Instruktur, Pengantar Kerja, Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan.**

BAB 4

VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dalam kerangka untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih yaitu **“KALTENG Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**, maka kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemban tugas untuk mengawal Program Pembangunan yang menjadi Visi Gubernur berdasarkan formulasi hasil analisis terhadap potensi daerah, permasalahan pokok dan isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi Gubernur dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya visi tersebut.

Selanjutnya Visi dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja;
2. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
4. Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan;
5. Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota dan Kerjasama antar daerah;
6. Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
7. Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju, mandiri dan produktif.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut:

4.2.1. Tujuan Jangka Menengah

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2. Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif
3. Meningkatkan kualitas hubungan industrial dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
4. Meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja
5. Menurunkan luas lahan transmigrasi yang bermasalah
6. Membangun Permukiman Transmigrasi Baru dan Pemenuhan Daya Tampung
7. Menciptakan kemandirian transmigran

Keterkaitan antara Tujuan Jangka Menengah di atas dengan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.2.1. di bawah ini.

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2. Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
3. Menurunnya angka kecelakaan kerja
4. Menurunnya luas lahan transmigrasi bermasalah
5. Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)
6. Terciptanya kemandirian transmigran

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.1
Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

**VISI : “Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)”**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran per-Tahun						Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 1 : Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja											
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Nilai Indeks)	60.90	59,50	59,53	59,56	59,59	60,02	60,05	60,05
			Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (Orang)	1.570	1.639	1.823	2.007,00	2.192	2.350	2.500	12.511
MISI 2 : Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja											
	Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (persen)	57.81	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00
			Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	83.33	84,50	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,00

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran per-Tahun						Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 3: Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja											
3	Meningkatkan kualitas hubungan industrial dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)	1.896.367	2.057.558	2,227,307	2,405,492	2,597,931	2,805,765	3,030,227	3,030,227
			Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	95.33	95,50	95,70	96,00	96,20	96,40	96,60	96,60
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	85.00	86,00	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	88,50
MISI 4: Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan											
	Meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja	Menurunnya angka kecelakaan kerja	Besaran Pemeriksaan perusahaan	6.10	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	14,00
			Besaran pengujian peralatan di perusahaan	2.85	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah perusahaan yang mendapat Penghargaan Zero Accident	42	32	34	36	38	40	42	222

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran per-Tahun						Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 5 : Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota dan Kerjasama antar daerah											
4	Menurunkan luas lahan transmigrasi yang bermasalah	Menurunnya luas lahan transmigrasi bermasalah (persil)	Jumlah bidang lahan transmigrasi yang mendapat sertifikat	3.223	700	700	700	700	700	700	4200
MISI 6 : Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan											
5	Membangun Permukiman Transmigrasi Baru dan Pemenuhan Daya Tampung	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	0	150	400	500	750	800	1000	3.600
MISI 7 : Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju, mandiri dan produktif											
6	Menciptakan kemandirian transmigran	Terciptanya kemandirian transmigran	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaannya (SP)	2	3	3	4	4	0	1	15
			Jumlah Transmigran yang dibina (KK)	3.310	2.535	2.575	1.950	1.800	2.600	3.600	3.600

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu *S – O (Strengths – Opportunity)* yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1 : Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja				
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Kab/Kota	Optimalisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan Fasilitasi penempatan di perusahaan
MISI 2 : Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja				
1	Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	Penyesuaian jurusan sesuai pasar kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kepelatihan/instruktur	Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi Mengadakan pelatihan berbasis kewirausahaan
MISI 3: Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja				
1	Meningkatkan kualitas hubungan industrial dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Meningkatkan kerjasama lembaga ketenagakerjaan	Pemberian pemahaman tentang aturan pengupahan Pemberdayaan LKS Bipartit Pemberian pemahaman tentang BPJS
MISI 4 : Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan				
1	Meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja	Menurunnya angka kecelakaan kerja	Inventarisasi data peralatan di tempat kerja dan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota	Pemeriksaan di Perusahaan Pemeriksaan peralatan yang ada di tempat kerja dan investigasi di lapangan

MISI 5 : Meningkatkan kualitas SDM transmigran dan penyebaran perpindahan penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota dan Kerjasama antar daerah				
1	Menurunkan luas lahan transmigrasi yang bermasalah	Menurunnya luas lahan transmigrasi bermasalah (persil)	Menyelesaikan permasalahan pertanahan di lokasi transmigrasi	Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)
MISI 6 : Mengembangkan kapasitas masyarakat dan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan				
1	Membangun Permukiman Transmigrasi Baru dan Pemenuhan Daya Tampung	Meningkatnya jumlah satuan permukiman baru dan pemenuhan daya tampung (KK)	Mengembangkan kerjasama antar daerah kabupaten/kota serta memberikan akses kepada masyarakat tentang potensi dan peluang yang tersedia di daerah transmigrasi	Fasilitasi penyediaan areal dan pembangunan permukiman transmigrasi baru di 14 Kabupaten/Kota
MISI 7 : Mengembangkan desa transmigrasi produktif menuju desa maju, mandiri dan produktif				
1	Menciptakan kemandirian transmigran	Meningkatnya satuan permukiman transmigrasi yang berakhir masa pembinaan (SP)	Revitalisasi permukiman transmigrasi yang ada untuk membentuk atau mendukung kawasan perkotaan baru dengan skema KTM	Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di UPT Bina
				Pembinaan Masyarakat dan Kawasan transmigrasi

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada program pembangunan RPJMD Kalteng 2016-2021.

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

5.1.1 Program Prioritas Urusan Wajib Tenaga Kerja

Berdasarkan Prioritas dan Arah Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, maka disusun program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga Kerja yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemagangan tenaga kerja
- b. Penyuluhan Standarisasi dan Sertifikasi
- c. Akreditasi lembaga pelatihan kerja
- d. Pelatihan berbasis masyarakat

- e. Pelatihan Keterampilan di desa Produktif
- f. Pelatihan pendamping Peningkatan Produktivitas
- g. Pelatihan Kewirausahaan

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tujuan program ini adalah mengatasi pengangguran dengan sasaran penciptaan dan memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi pasar kerja. Pencapaian tujuan program ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanduan dan terapan TPK
- b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa SLTA
- c. Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing
- d. Pemberdayaan Tenaga Kerja lokal /Pencaker melalui penciptaan Tenaga Kerja Mandiri
- e. Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online
- f. Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja /Petugas Antar Kerja

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun kegiatan dalam program ini adalah:

- a. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- b. Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL)
- c. Penyusunan,penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaan pelaksanaan pengupahan dan BPJS Ketenagakerjaan

- d. Sosialisasi UMP di kabupaten/kota
- e. Sosialisasi sarana hubungan industrial
- f. Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit

4. Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan di perusahaan dan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap norma-norma kerja. Adapun kegiatan dalam program ini adalah:

- a. Pemeriksaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3
- b. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
- c. Pencanangan Bulan K3
- d. Penerapan SMK3

5.1.2 Program Prioritas Urusan Pilihan Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi tahun 2016-2021 diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan kecukupan pangan, memperkuat pilar ketahanan daerah, mendukung pemerataan investasi secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

1. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Tujuan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi adalah Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru. Adapun kegiatan dalam program ini adalah:

- a. Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPT BINA
- b. Penjaringan Anak Trans Berprestasi dan Sosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPT Bina
- c. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

- d. Pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan UPT Bina
- e. Pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tujuan Program **Pembangunan Kawasan Transmigrasi** adalah mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan. Adapun kegiatan dalam program ini adalah:

- a. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan
- b. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- c. Koordinasi dan Penyelesaian Lokasi Bermasalah
- d. Pengukuran dan pengurusan HPL
- e. Monitoring permukiman transmigrasi baru
- f. Penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah
 - a. Penyusunan norma standar bidang P4TRANS
 - b. Pencermatan RTSP
 - c. Pencermatan IPPKH
 - d. Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)
 - e. Monitoring dan evaluasi kawasan permukiman siap bangun

5.2. Indikator Kerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Akhir Pencapaian

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir (2021)
(1)	(2)	(3)
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		
a. Pemagangan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti program pemagangan	120 Orang
b. Penyuluhan Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah pengelola pelatihan, asosiasi profesi dan pencari kerja yang mengerti pentingnya standarisasi sertifikasi kompetensi	60 Orang
c. Akreditasi lembaga pelatihan kerja	Jumlah peserta Bimtek yang dilaksanakannya oleh Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Kalteng	18 LPK
d. Pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis masyarakat	360 Orang
e. Pelatihan Keterampilan di desa Produktif	Jumlah penduduk di desa produktif yang mengikuti pelatihan ketrampilan	120 Orang
f. Pelatihan pendamping Peningkatan Produktivitas	Jumlah peserta pelatihan pendamping peningkatan produktivitas	120 Orang
g. Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan yang menjadi wirausaha	360 Orang
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
a. Pemanduan dan terapan TPK (PM2L)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan Pemanduan Terapan Teknologi Padat Karya	600 Orang
b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada siswa SLTA	Jumlah Siswa SLTA yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	2.100 Orang
c. Monitoring Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Prov. Kalimantan Tengah yang termonitor	78 Perusahaan
d. Pemberdayaan Tenaga Kerja lokal /Pencaker melalui penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah pencari kerja yang menjadi tenaga kerja mandiri	300 Orang
e. Pengelolaan kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online	Jumlah Buku Laporan Informasi Pasar Kerja	72 Buku
f. Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja /Petugas Antar Kerja	Jumlah fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja yang mengikuti rapat koordinasi	150 Orang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir (2021)
(1)	(2)	(3)
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
a. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial	270 Perusahaan
b. Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL) pada 14 kabupaten/kota	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis kebutuhan hidup layak	180 Orang
c. Penyusunan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaan pelaksanaan pengupahan dan jamsostek	UMP setiap tahun ditetapkan dan meningkatnya pengetahuan tentang pengupahan	30 Paket
d. Sosialisasi UMP di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi UMP	180 Perusahaan
e. Sosialisasi sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi sarana hubungan industrial	270 Perusahaan
f. Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit	Jumlah perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Tripartit	210 Perusahaan
4. Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan		
a. Pemeriksaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Jumlah perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3	300 Perusahaan
b. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	150 Orang
c. Pencanangan Bulan K3	Jumlah Perusahaan yang mendapat penghargaan <i>Zero Accident</i>	222 Perusahaan
d. Penerapan SMK3	Jumlah peserta Bimtek SMK3	360 Orang
5. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
a. Sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPT BINA	Jumlah UPT yang ikut ambil bagian dalam sosialisasi kebijakan pengakhiran status UPT Bina	24 Kimtrans
b. Penjaringan Anak Trans Berprestasi dan Sosialisasi Layanan Kesehatan Transmigran UPT Bina	Jumlah UPT yang disertakan dalam sosialisasi penjaringan anak trans berprestasi serta menerima layanan kesehatan di UPT Bina	132 SP
c. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah permukiman transmigrasi yang menerima sarana air bersih dan sapras desa	66 SP
d. Pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan UPT Bina	Jumlah unit bantuan pemberdayaan masyarakat yang diberikan ke UPT	108 Unit

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir (2021)
(1)	(2)	(3)
e. Pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi	Jumlah Sarana Permukiman yang diberi alat angkutan hasil produksi	12 SP
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
a. Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	Jumlah kegiatan penguatan SDM di kawasan transmigrasi	120 Orang
b. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kabupaten/provinsi yang berperan aktif sebagai pengirim/penerima dan memiliki persamaan persepsi tentang ketransmigrasian	18 Paket
c. Koordinasi dan penyelesaian lokasi bermasalah	Jumlah lokasi yang masuk dalam kegiatan koordinasi dan pemantapan lokasi	36 Lokasi
d. Pengukuran dan pengurusan HPL	Jumlah lokasi pengukuran dan pengurusan Hak Pengolahan Lahan	18 Lokasi
e. Monitoring permukiman transmigrasi baru	Jumlah kabupaten yang didata untuk permukiman transmigrasi baru	24 Lokasi
f. Penyelesaian masalah pertanahan lokasi transmigrasi di Kalimantan Tengah	Jumlah lokasi yang diselesaikan masalah pertanahannya	30 Lokasi
g. Penyusunan Data dan Peta Tematik Kawasan Trans Potensial	Jumlah lokasi yang dipetakan	30 Lokasi
h. Pencermatan RTSP	Jumlah lokasi layak untuk transmigrasi	24 Lokasi
i. Pencermatan IPPKH	Jumlah lokasi yang memiliki kepastian Letak dan Batas Koordinat IPPKH	12 Lokasi
j. Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)	Jumlah lokasi bermasalah yang kepemilikan lahan transmigrasinya sudah diidentifikasi	18 Lokasi

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Pencari Kerja
2. Perusahaan-Perusahaan
3. Masyarakat Transmigran

5.4 Pendanaan Indikatif

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain.

Tabel 5.2.
Pendanaan Indikatif untuk tiap-tiap program strategis yang dilaksanakan pada periode tahun 2016-2021

Program	Tahun Pendanaan Indikatif (x 1000)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,879,394	854,502	3,062,568	3,565,389	3,996,194	7,250,883
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	896,000	1,130,000	3,545,474	3,929,329	4,273,650	7,064,980
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	641,212	435,000	567,900	583,100	613,700	650,000
4. Program Pendayagunaan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	588,644	359,370	471,800	491,900	513,200	525,700
5. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	95,250	1,014,177	1,295,904	1,324,324	1,383,073	1,432,162
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0	798,600	1,200,000	1,250,000	1,350,000	1,500,000
Jumlah	5,100,500	4,591,649	10,143,646	11,144,042	12,129,817	18,423,725

BAB 6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2015	Target Capaian Tiap Tahun						Target Kinerja Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian								
1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	4,54	4,5	4,0	4,0	4,0	3,50	3,50
4	Ketenagakerjaan								
4.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	95,46	95,75	96,00	96,25	96,50	96,75	97,00	97,00
14	Ketenagakerjaan								
14,2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	172	150	128	106	84	62	50	50
14,3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,11	71,34	71,57	71,81	72,04	72,27	72,50	72,50
14,4	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	1.570	1.639	1.823	2.007	2.192	2.350	2.500	12.511
14,5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,54	4,54	4,5	4,0	4,0	4,0	3,50	3,50
8,1	Ketransmigrasian								
8.3	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	0	150	400	500	750	800	1.000	3.600

BAB 7

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Proiritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dalam periode 2016-2021. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)					4.894.993.000		7.154.949.729		7.398.378.078		7.949.249.755		8.548.690.996		41.286.328.658		
			2.01	URUSAN TENAGA KERJA					4.894.993.000		7.154.949.729		7.398.378.078		7.949.249.755		8.548.690.996		41.286.328.658		
			2.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.819.621.000		2.263.709.729		2.070.639.858		2.143.112.252		2.218.121.179		12.534.014.118	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.01 - 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Keperluan Benda Pos (Materai, Perangko), biaya pengiriman Surat/Dokumen, biaya bahan bakar Pengantar Surat	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	19.844.000	12 Bulan	20.538.540	12 Bulan	21.257.389	12 Bulan	22.001.398	72 Bulan	109.641.327	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Biaya Tagihan Telepon, Listrik dan Air/PDAM, serta Fasimile/Internet	12 Bulan	370.000.000	12 Bulan	380.000.000	- Bulan	380.000.000	- Bulan	393.300.000	- Bulan	407.065.500	- Bulan	421.312.793	24 Bulan	2.351.678.293	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Bantuan Biaya Berobat PNS ke Luar Daerah	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	19.488.260	12 Bulan	20.170.349	12 Bulan	20.876.311	12 Bulan	21.606.982	72 Bulan	108.141.902	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	LUAR PROVINSI
			2.01 - 01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlaksananya Jasa Jaminan Gedung dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	8.769.717	12 Bulan	9.076.657	12 Bulan	9.394.340	12 Bulan	9.723.142	72 Bulan	54.963.856	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran KIR dan Pajak kendaraan R.4	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	9.744.130	12 Bulan	10.085.175	12 Bulan	10.438.156	12 Bulan	10.803.491	72 Bulan	57.070.952	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya tunjangan pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja aparatur	12 Bulan	752.721.000	12 Bulan	817.721.000	12 Bulan	733.461.128	12 Bulan	759.132.267	12 Bulan	785.701.897	12 Bulan	813.201.463	72 Bulan	4.661.938.755	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan Dinas Nakertrans Prov. Kalteng	12 Bulan	345.300.000	12 Bulan	390.300.000	12 Bulan	336.464.809	12 Bulan	348.241.077	12 Bulan	360.429.515	12 Bulan	373.044.548	72 Bulan	2.153.779.949	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	5.600.000	12 Bulan	9.744.130	12 Bulan	10.085.175	12 Bulan	10.438.156	12 Bulan	10.803.491	72 Bulan	56.670.952	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Dana untuk pengadaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.525.000	12 Bulan	16.068.375	12 Bulan	16.630.768	72 Bulan	108.224.143	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Dana untuk Cetak/Penggandaan	12 Bulan	30.910.100	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.525.000	12 Bulan	16.068.375	12 Bulan	16.630.768	72 Bulan	104.134.243	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen listrik/alat penerangan Kantor selama 12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	19.488.260	12 Bulan	20.170.349	12 Bulan	20.876.311	12 Bulan	21.606.982	72 Bulan	112.141.902	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	63.336.845	12 Bulan	65.553.635	12 Bulan	67.848.012	12 Bulan	70.222.692	72 Bulan	351.961.184	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bacaan Koran/Majalah	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	292.323.900	12 Bulan	30.255.524	12 Bulan	31.314.467	12 Bulan	32.410.473	72 Bulan	431.304.364	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Snack/Makan Tamu/Rapat	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	29.232.390	12 Bulan	30.255.524	12 Bulan	31.314.467	12 Bulan	32.410.473	72 Bulan	173.212.854	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan mengikuti Rapat dan Perjalanan Dinas keluar Daerah	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	194.882.600	12 Bulan	201.703.491	12 Bulan	208.763.113	12 Bulan	216.069.822	72 Bulan	1.026.419.026	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Laporan mengikuti Rapat /Perjalanan Dinas kedalam Daerah	12 Bulan	129.879.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	116.929.560	12 Bulan	121.022.095	12 Bulan	125.257.868	12 Bulan	129.641.893	72 Bulan	672.730.416	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan			150.000.000		315.065.000		325.462.145		336.202.396		347.297.075		2.339.376.616	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.01 - 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Assrama Balaitrans, dan Perlengkapan Kantor Dinas	- Paket	-	- Paket	-	1 Paket	113.630.000	1 Paket	117.379.790	1 Paket	121.253.323	1 Paket	125.254.683	4 Paket	477.517.796	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Taman dan Pengecatan Gedung serta Pagar Kantor	1 Paket	768.429.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	61.980.000	1 Paket	64.025.340	1 Paket	66.138.176	1 Paket	68.320.736	6 Paket	1.088.893.252	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan /kend.operasional Roda 4 dan 2	4 Buah	60.000.000	4 Buah	70.000.000	4 Buah	72.310.000	4 Buah	74.696.230	4 Buah	77.161.206	4 Buah	79.707.525	24 Buah	433.874.961	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Perbaikan AC dan Operasional Genset	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	51.650.000	12 Bulan	53.354.450	12 Bulan	55.115.147	12 Bulan	56.933.947	72 Bulan	262.053.544	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 02.97	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan kantor	Peralatan kebersihan dan alat dan bahan pembersih	1 Paket	1.921.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.495.000	1 Paket	16.006.335	1 Paket	16.534.544	1 Paket	17.080.184	6 Paket	77.037.063	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Paket			65.000.000		93.150.000		96.410.250		99.784.609		103.277.070		457.621.929	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.01 - 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bantuan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pelatihan /Bimtek/Kursus	- Bulan	-	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.700.000	12 Bulan	21.424.500	12 Bulan	22.174.358	12 Bulan	22.950.460	60 Bulan	102.249.318	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 05.39	Bimbingan teknis keuangan	Bimbingan Teknis Pembinaan Pengelolaan Keuangan Lingkup Disnakertrans	- Paket	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	72.450.000	1 Paket	74.985.750	1 Paket	77.610.251	1 Paket	80.326.610	5 Paket	355.372.611	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		- Paket			281.500.000		380.025.000		392.565.825		405.520.498		418.902.672		2.362.513.995	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.01 - 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Disnakertrans	10 Buku	5.000.000	10 Buku	5.000.000	10 Buku	6.750.000	10 Buku	6.972.750	10 Buku	7.202.851	10 Buku	7.440.545	60 Buku	38.366.146	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan baik dana APBD maupun APBN Dinas Disnakertrans	10 Buku	4.500.000	10 Buku	4.500.000	10 Buku	6.075.000	10 Buku	6.275.475	10 Buku	6.482.566	10 Buku	6.696.490	60 Buku	34.529.531	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	10 Buku	4.500.000	10 Buku	4.500.000	10 Buku	6.075.000	10 Buku	6.275.475	10 Buku	6.482.566	10 Buku	6.696.490	60 Buku	34.529.531	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Peny. laporan Tahunan baik dana APBD maupun APBN Disnakertrans	10 Buku	10.000.000	10 Buku	5.000.000	10 Buku	6.750.000	10 Buku	6.972.750	10 Buku	7.202.851	10 Buku	7.440.545	60 Buku	43.366.146	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06.06	Penyusunan RKA-SKPD	Terlaksananya Peny.RKA - SKPD Disnakertrans	10 Buku	20.000.000	10 Buku	15.000.000	10 Buku	20.250.000	10 Buku	20.918.250	10 Buku	21.608.552	10 Buku	22.321.634	60 Buku	120.098.436	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06.08	Penyusunan LKPJ SKPD , LPPD dan LAKIP SATKER	Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi Satker Dinas Nakertrans Prov Kalteng	- Buku	-	10 Buku	7.500.000	10 Buku	10.125.000	10 Buku	10.459.125	10 Buku	10.804.276	10 Buku	11.160.817	50 Buku	50.049.218	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06.42	Penyusunan Rencana serta Program kegiatan	Terlaksananya Rakor Teknis Kab/Kota dlm Penyusunan Program dan Kegiatan APBN dan Sinkronisasi Kegiatan APBD Kab /Kota, Penyusunan pendampingan RTK	3 Paket	400.000.000	3 Paket	220.000.000	3 Paket	297.000.000	3 Paket	306.801.000	3 Paket	316.925.433	3 Paket	327.383.972	18 Paket	1.868.110.405	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 06.50	Identifikasi Barang Milik Daerah	Monitoring Aset Daerah yang ada di Kabupaten	1 Paket	40.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	27.000.000	1 Paket	27.891.000	1 Paket	28.811.403	1 Paket	29.762.179	6 Paket	173.464.582	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1 Paket			854.502.000		1.397.000.000		1.536.700.000		1.690.370.000		1.859.407.000		8.167.673.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 15.14	Pemagangan tenaga kerja	Terselenggaranya pemagangan tenaga kerja di 2 kabupaten	20 Orang	155.000.000	20 Orang	84.502.000	20 Orang	143.000.000	20 Orang	157.300.000	20 Orang	173.030.000	20 Orang	190.333.000	120 Orang	903.165.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 15.15	Penyuluhan standarisasi sertifikasi	Terbentuknya TUK, dan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi	10 Orang	-	10 Orang	80.000.000	10 Orang	132.000.000	10 Orang	145.200.000	10 Orang	159.720.000	10 Orang	175.692.000	60 Orang	692.612.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKARAYA
			2.01 - 15.17	Akreditasi lembaga pelatihan kerja	Terakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Kotim dan Bimtek Akreditasi	2 LPK	151.886.000	2 LPK	80.000.000	3 LPK	132.000.000	3 LPK	145.200.000	3 LPK	159.720.000	3 LPK	175.692.000	16 LPK	844.498.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
			2.01 - 15.18	Pelatihan berbasis masyarakat	Terlatihnya Tenaga Kerja Terampil	40 Orang	447.808.500	40 Orang	350.000.000	40 Orang	495.000.000	40 Orang	544.500.000	40 Orang	598.950.000	40 Orang	658.845.000	240 Orang	3.095.103.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KABUPATEN BARITO SELATAN
			2.01 - 15.25	Pelatihan Keterampilan Di Desa Produktif	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan di Desa Produktif	- Kabupaten	-	1 Kabupaten	75.000.000	1 Kabupaten	82.500.000	1 Kabupaten	90.750.000	1 Kabupaten	99.825.000	1 Kabupaten	109.807.500	5 Kabupaten	457.882.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 15.28	Pelatihan Pendamping Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya Produktifitas, Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Pendamping	- Orang	-	20 Orang	85.000.000	20 Orang	187.000.000	20 Orang	205.700.000	20 Orang	226.270.000	20 Orang	248.897.000	100 Orang	952.867.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 15.29	Pelatihan Kewirausahaan dan Gugus Kendali Mutu	Terlatihnya tenaga kerja terampil	20 Orang	75.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	225.500.000	40 Orang	248.050.000	40 Orang	272.855.000	40 Orang	300.140.500	220 Orang	1.221.545.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKARAYA
			2.01 - 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		20 Orang			930.000.000		1.391.500.000		1.530.650.000		1.683.715.000		1.852.086.500		7.888.951.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 16.10	Pemanduan dan terapan TPK	Terselenggaranya Pemanduan dan Terapan Teknologi Padat Karya	40 Orang	231.000.000	40 Orang	260.000.000	40 Orang	357.500.000	40 Orang	393.250.000	40 Orang	432.575.000	40 Orang	475.832.500	240 Orang	2.150.157.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 16.14	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Siswa SLTA	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	350 Orang	115.000.000	350 Orang	90.000.000	350 Orang	165.000.000	350 Orang	181.500.000	350 Orang	199.650.000	350 Orang	219.615.000	2.100 Orang	970.765.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 16.15	Monitoring pengguna Tenaga Kerja Asing	Terselenggaranya Monitoring Tenaga Kerja Asing yang bekerja di 6 Kabupaten	14 Persh	85.000.000	14 Persh	90.000.000	14 Persh	154.000.000	14 Persh	169.400.000	14 Persh	186.340.000	14 Persh	204.974.000	84 Persh	889.714.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 16.21	Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal/Pencaker Melalui Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Terciptanya kesempatan kerja pembukaan usaha mandiri	- Orang	-	30 Orang	350.000.000	30 Orang	473.000.000	30 Orang	520.300.000	30 Orang	572.330.000	30 Orang	629.563.000	150 Orang	2.545.193.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 16.22	Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Online	Pengelolaan kegiatan IPK dan BKOL	30 Orang	70.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	159.500.000	30 Orang	175.450.000	30 Orang	192.995.000	30 Orang	212.294.500	180 Orang	885.239.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 16.23	Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja/Petugas	Terlaksananya temu konsultasi pengantar kerja/petugas antar kerja	- Orang	-	20 Orang	65.000.000	20 Orang	82.500.000	20 Orang	90.750.000	20 Orang	99.825.000	20 Orang	109.807.500	100 Orang	447.882.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		- Orang			435.000.000		709.500.000		780.450.000		858.495.000		944.344.500		4.369.002.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			2.01 - 17.03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	45 Perusahaan	246.212.500	45 Perusahaan	80.000.000	45 Perusahaan	165.000.000	45 Perusahaan	181.500.000	45 Perusahaan	199.650.000	45 Perusahaan	219.615.000	270 Perusahaan	1.091.977.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 17.09	Bimbingan teknis kebutuhan hidup layak (KHL)	Terlaksananya Bimtek KHL	30 Orang	85.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	93.500.000	30 Orang	102.850.000	30 Orang	113.135.000	30 Orang	124.448.500	180 Orang	593.933.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 17.10	Penyusunan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMSP, serta monitoring pembinaan pelaksanaan pengupahan dan jamsostek	UMP ditetapkan dan meningkatnya pengetahuan tentang Pengupahan dan BPJS TK	2 Paket	185.000.000	2 Paket	80.000.000	2 Paket	110.000.000	2 Paket	121.000.000	2 Paket	133.100.000	2 Paket	146.410.000	12 Paket	775.510.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
			2.01 - 17.11	Sosialisasi UMP di kabupaten/kota	Terlaksananya Sosialisasi UMP	- Perusahaan	-	30 Perusahaan	75.000.000	30 Perusahaan	99.000.000	30 Perusahaan	108.900.000	30 Perusahaan	119.790.000	30 Perusahaan	131.769.000	150 Perusahaan	534.459.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 17.12	Bimbingan teknis administrasi mediator	Terlaksananya Bimtek Administrasi Mediator	- Orang	-	30 Orang	-	30 Orang	88.000.000	30 Orang	96.800.000	30 Orang	106.480.000	30 Orang	117.128.000	150 Orang	408.408.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 17.13	Sosialisasi sarana hubungan industrial	Terlaksananya Sosialisasi sarana hubungan industrial	30 Perusahaan	65.000.000	30 Perusahaan	62.500.000	30 Perusahaan	77.000.000	30 Perusahaan	84.700.000	30 Perusahaan	93.170.000	30 Perusahaan	102.487.000	180 Perusahaan	484.857.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 17.14	Pengembangan Lembaga Kerjasama Tripartit	Terwujudnya peran dan Fungsi lembaga kerjasama Tripartit	30 Perusahaan	60.000.000	30 Perusahaan	62.500.000	30 Perusahaan	77.000.000	30 Perusahaan	84.700.000	30 Perusahaan	93.170.000	30 Perusahaan	102.487.000	180 Perusahaan	479.857.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.01 - 18	Program Pendayagunaan Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan		30 Perusahaan			359.370.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000		3.167.175.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.01 - 18.24	Pemeriksaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan K3	- Perusa haan	-	20 Perusa haan	95.000.000	20 Perusa haan	143.000.000	20 Perusa haan	157.300.000	20 Perusa haan	173.030.000	20 Perusa haan	190.333.000	100 Perusa haan	758.663.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H
			2.01 - 18.25	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Pekerja anak yang ditarik dari BPTA, Pembina tenaga kerja wanita terbaik, penyuluhan peraturan berbasis gender	- Anak	-	25 Anak	100.000.000	25 Anak	192.500.000	25 Anak	211.750.000	25 Anak	232.925.000	25 Anak	256.217.500	125 Anak	993.392.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H
			2.01 - 18.26	Pencanangan Bulan K3	Terlaksananya upacara bulan K3 dan menurunnya angka kecelakaan kerja di perusahaan	- Orang	-	150 Orang	80.000.000	150 Orang	110.000.000	150 Orang	121.000.000	150 Orang	133.100.000	150 Orang	146.410.000	750 Orang	590.510.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.01 - 18.27	Penerapan SMK3	Terlaksananya penyuluhan/bimtek SMK3	- Orang	-	30 Orang	84.370.000	30 Orang	159.500.000	30 Orang	175.450.000	30 Orang	192.995.000	30 Orang	212.294.500	150 Orang	824.609.500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H
			2.01 - 18.27	URUSAN PILIHAN		- Orang			1.972.777.000		3.325.500.000		3.644.850.000		3.995.541.000		4.380.680.370		19.933.269.070		
			3.08	URUSAN TRANSMIGRAS I		- Orang			1.972.777.000		3.325.500.000		3.644.850.000		3.995.541.000		4.380.680.370		19.933.269.070		
			3.08 - 21	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		- Orang			1.014.177.000		1.974.500.000		2.171.950.000		2.389.145.000		2.628.059.500		11.348.802.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi	
			3.08 - 21.02	Sosialisasi Kebijakan Pengakhiran Status UPT BINA	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pengakhiran Status UPT Bina	- Kimtran s	-	3 Kimtran s	50.000.000	3 Kimtran s	66.000.000	3 Kimtran s	72.600.000	3 Kimtran s	79.860.000	3 Kimtran s	87.846.000	15 Kimtran s	356.306.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3.08 - 21.07	Sosialisasi Penjaringan Anak Trans Berprestasi dan Layanan Kesehatan Transmigran UPT Bina	Terdatanya Penjaringan Anak Trans berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dan layanan kesehatan transmigran di UPT Bina	- SP	-	11 SP	50.000.000	11 SP	66.000.000	11 SP	72.600.000	11 SP	79.860.000	11 SP	87.846.000	55 SP	356.306.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 21.08	Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan UPT Bina	Bantuan Pengadaan Buku Penunjang dan Alat peraga SD di lokasi UPT yang masih dalam pembinaan	- SP Bina	-	5 SP Bina	90.000.000	5 SP Bina	825.000.000	5 SP Bina	907.500.000	5 SP Bina	998.250.000	5 SP Bina	1.098.075.000	25 SP Bina	3.918.825.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 21.09	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah kimtrans dan kawasan trans yang sarprasnya dikembangkan dan berfungsi	3 SP	1.170.970.700	11 SP	325.000.000	11 SP	192.500.000	11 SP	211.750.000	11 SP	232.925.000	11 SP	256.217.500	58 SP	2.389.363.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 21.10	Pengembangan Usaha Ekonomi di Kawasan Transmigrasi	Pengembangan lahan usaha produktif di permukiman transmigrasi melalui bantuan pengembangan usaha ekonomi di permukiman transmigrasi yang masih dibina	- SP	-	2 SP	499.177.000	2 SP	825.000.000	2 SP	907.500.000	2 SP	998.250.000	2 SP	1.098.075.000	10 SP	4.328.002.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		- SP			798.600.000		1.111.000.000		1.222.100.000		1.344.310.000		1.478.741.000		7.146.001.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3.08 - 22.01	Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan	Terlaksananya pelatihan berbasis masyarakat, kewirausahaan yang berkembang di kawasan transmigrasi yang masih dibina	2 Paket	440.000.000	2 Paket	148.600.000	2 Paket	275.000.000	2 Paket	302.500.000	2 Paket	332.750.000	2 Paket	366.025.000	12 Paket	1.864.875.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.02	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya sosialisasi dan promosi program transmigrasi, pendasi calon trans, terlaksananya pemantauan pendapsi, konsultasi temu teknis perpindahan dan penempatan, monitoring pasca penempatan dan sosialisasi adaptasi lingkungan bagi trans TPA	4 Paket	230.000.000	4 Paket	120.000.000	4 Paket	198.000.000	4 Paket	217.800.000	4 Paket	239.580.000	4 Paket	263.538.000	24 Paket	1.268.918.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.03	Koordinasi dan Penyelesaian Lokasi Bermasalah	Terlaksananya koordinasi dan penyelesaian lokasi bermasalah	4 Lokasi	70.000.000	4 Lokasi	55.000.000	4 Lokasi	66.000.000	4 Lokasi	72.600.000	4 Lokasi	79.860.000	4 Lokasi	87.846.000	24 Lokasi	431.306.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.04	Pengukuran dan Pengurusan HPL	Pengukuran dan pengurusan HPL	4 Lokasi	226.250.000	4 Lokasi	70.000.000	4 Lokasi	88.000.000	4 Lokasi	96.800.000	4 Lokasi	106.480.000	4 Lokasi	117.128.000	24 Lokasi	704.658.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.05	Monitoring dan Evaluasi Kawasan Permukiman Siap Bangun	Sosialisasi penyediaan tanah/pembangunan permukiman dan penyusunan data dan peta tematik kawasan transmigrasi	3 Lokasi	35.000.000	3 Lokasi	90.000.000	3 Lokasi	99.000.000	3 Lokasi	108.900.000	3 Lokasi	119.790.000	3 Lokasi	131.769.000	18 Lokasi	584.459.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3.08 - 22.06	Penyelesaian Masalah Pertanahan Lokasi Transmigrasi di Kalimantan Tengah	Penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi	3 Lokasi	80.000.000	3 Lokasi	70.000.000	3 Lokasi	88.000.000	3 Lokasi	96.800.000	3 Lokasi	106.480.000	3 Lokasi	117.128.000	18 Lokasi	558.408.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.07	Penyusunan Data dan Peta Tematik Kawasan Trans Potensial	Penyelesaian norma standard bidang P2KT Berupa spek dan RAB dan penyelesaian data dan peta tematik kawasan transmigrasi potensial kab/kota	- Lokasi	-	4 Lokasi	70.000.000	4 Lokasi	88.000.000	4 Lokasi	96.800.000	4 Lokasi	106.480.000	4 Lokasi	117.128.000	20 Lokasi	478.408.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.08	Pencermatan RTSP	Terlaksananya pencermatan hasil RTSP	4 Lokasi	50.000.000	4 Lokasi	55.000.000	4 Lokasi	66.000.000	4 Lokasi	72.600.000	4 Lokasi	79.860.000	4 Lokasi	87.846.000	24 Lokasi	411.306.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.09	Pencermatan IPPKH	Terlaksananya pencermatan izin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH)	2 Lokasi	60.000.000	2 Lokasi	55.000.000	2 Lokasi	66.000.000	2 Lokasi	72.600.000	2 Lokasi	79.860.000	2 Lokasi	87.846.000	12 Lokasi	421.306.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 22.10	Identifikasi Pemilikan Lahan (IPL)	Terlaksananya identifikasi kepemilikan lahan transmigrasi	- Lokasi	-	3 Lokasi	65.000.000	3 Lokasi	77.000.000	3 Lokasi	84.700.000	3 Lokasi	93.170.000	3 Lokasi	102.487.000	15 Lokasi	422.357.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 23	Program pengembangan data/informasi		- Lokasi			160.000.000		240.000.000		250.800.000		262.086.000		273.879.870		1.438.465.870	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			3.08 - 23.07	Penyusunan dan Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Terlaksananya Kalteng Expo dan Pawai Budaya	2 Paket	191.700.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	150.000.000	2 Paket	156.750.000	2 Paket	163.803.750	2 Paket	171.174.919	12 Paket	933.428.669	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKARAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			3.08 - 23.18	Pengumpulan dan Penyusunan Data/Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tersusun dan Terkumpulnya Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	60.000.000	14 Kab/Kota	50.000.000	14 Kab/Kota	75.000.000	14 Kab/Kota	78.375.000	14 Kab/Kota	81.901.875	14 Kab/Kota	85.587.459	84 Kab/Kota	430.864.334	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			3.08 - 23.19	Penyusunan laporan tahunan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	- Paket	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.675.000	1 Paket	16.380.375	1 Paket	17.117.492	5 Paket	74.172.867	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	KOTA PALANGKA RAYA
Jumlah									6.867.770.000		10.480.449.729		11.043.228.078		11.944.790.755		12.929.371.366		61.219.597.728		